

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tren global tahun 2024 menunjukkan peningkatan jumlah negara yang mengalami insiden teroris dari 58 negara menjadi 66 negara. Selain itu, pusat aktivitas terorisme juga berpindah ke wilayah Sahel sebanyak 33%, termasuk Burkina Faso yang mengalami jumlah kematian akibat terorisme tertinggi. Selanjutnya, pada tren tingkat regional, hal ini tidak berlaku secara merata. Menurut data, sejak tahun 2007 hingga 2024, Filipina menempati peringkat kedua sebagai negara dengan tingkat ancaman teroris tertinggi di Asia Pasifik. Laporan menunjukkan bahwa pada tahun 2024 telah terjadi 22 serangan yang mengakibatkan 31 kematian (Global Terrorism Index, 2025). Berikut adalah daftar global dari jumlah kematian akibat terorisme dari tahun 2007 hingga 2024.

Tabel 1. 1 Jumlah Kematian akibat Terorisme dari Tahun 2007-2024

<i>No</i>	<i>Region</i>	<i>Country</i>	<i>Overall Score</i>
1	<i>Asia Pasific</i>	<i>Myanmar</i>	6.929
		<i>Philippines</i>	5.166
2	<i>Sub-Sahara Africa</i>	<i>Burkina Faso</i>	8.581
		<i>Mali</i>	7.907
3	<i>Middle East and North Africa</i>	<i>Syria</i>	8.006
		<i>Israel</i>	7.463
4	<i>South Asia</i>	<i>Pakistan</i>	8.374
		<i>Afganistan</i>	7.262
5	<i>South America</i>	<i>Colombia</i>	6.381
		<i>Chile</i>	5.162
6	<i>Russia and Eurasia</i>	<i>Russia</i>	6.267
		<i>Ukraine</i>	2.003
7	<i>North America</i>	<i>United States of America</i>	3.517
		<i>Canada</i>	1.87
8	<i>Central America and The</i>	<i>Mexico</i>	0.582

	<i>Caribbean</i>	<i>Costa Rica</i>	0
9	<i>Europe</i>	<i>Germany</i>	4.748
		<i>Turkiye</i>	3.968

Source: (Global Terrorism Index, 2025)

Berdasarkan fakta dan fenomena serangan teroris global diatas, Filipina adalah salah satu negara yang terkena dampak afiliasi. Negara ini merupakan negara kepulauan di Asia yang memiliki tiga gugusan utama. Pertama adalah wilayah Filipina utara (Luzon), wilayah tengah (Visayas), dan wilayah selatan (Mindanao) (Permanent Mission of the Republic of the Philippines to the United Nations, t.t.). Filipina melewati sejarah panjang kolonialisme dan tantangan terhadap stabilitas keamanan negara. Berdasarkan historis, Filipina mempunyai gugusan yang berbeda, wilayah utara Filipina kental sekali dengan warisan budaya kolonial (Spanyol dan Amerika), sedangkan wilayah selatan terlihat sangat kontras dengan warisan budaya Islam. Wilayah selatan dalam hal ini merujuk pada Kepulauan Mindanao. Pulau ini merupakan pulau terbesar kedua di Filipina. Mindanao merupakan wilayah yang multi etnis serta multi agama. Mulai dari penduduk Muslim, Kristian, masyarakat adat, dan klan tradisional.

Wilayah ini melewati sejarah panjang terkait gerakan separatis, adanya kelompok pemberontak, dan perhelatan klan-klan politik. Tidak hanya itu, Mindanao juga memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi produksi pertanian yang besar, namun sebanyak 37% penduduknya mengalami kemiskinan (Global Initiative Against Transnational Organized Crime., 2020). Selain tu, pergelutan politik klan yang turut mempengaruhi dan situasi diperburuk dengan kemunculan kelompok ekstremis Islam, sebagai fokus konflik terbaru bagi

pemerintah di era kontemporer. Secara historis, tidak heran jika Filipina Selatan terkhusus Mindanao memiliki keterhubungan dengan *Islamic State* (IS). Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang memuat terkait perkembangan kelompok-kelompok afiliasi Al-Qaeda dan ISIS di Mindanao seringkali menggunakan alat-alat khusus seperti etnis, budaya, konflik sipil, dan agama terkhusus agama Islam (Namora, 2016).

Sejalan dengan ini, laporan Sekretaris Jenderal dan Monitoring Team Dewan Keamanan PBB ke-36 menyebutkan bahwa kelompok teroris global dalam mempertahankan eksistensinya menggunakan aktivitas kejahatan transnasional berupa penyelundupan senjata, *human trafficking*, serta praktik *kidnapping for ransom* (United Nations, 2025b). Kerentanan yang dihadapi, memicu perkembangan basis kelompok teroris di Mindanao. Berikut adalah data kelompok-kelompok ekstrim yang berkembang di Mindanao, Filipina Selatan.

Tabel 1. 2 *Violent Extremist Organizations* (VEOs) di Mindanao

Gugusan Wilayah Mindanao	<i>Violent Extremist Organizations</i> (VEOs) yang Berkembang
Mindanao Utara	Islamic Stae Lanao (ISL atau KIM yang juga dikenal sebagai Maute Grup), CPP/NPA.
Mindanao Selatan	Anshor Khilafa Philippines, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF), Moro Islamic Liberation Front (MILF), Al Khobar, CPP/NPA, dan Moro National Liberation Front (MNLF).
Mindanao Tengah	MILF, BIFF, Al Khobar.
Mindanao Barat	Abu Sayyaf Grup (ASG) alias Harakat-ul-istamiyahi, MNLF, MILF, dan Jund ut Tawhid.

Source: (Global Initiative Against Transnational Organized Crime., 2020)

Fenomena ini pada akhirnya melahirkan beberapa strategi kontra-terorisme sebagai upaya memerangi ancaman keamanan nasional dan menciptakan

perdamaian berkelanjutan. Kontra-terorisme atau yang dapat disebut anti terorisme merupakan definisi yang kompleks dan memuat segala upaya, taktik, strategi, atau kebijakan dalam serta luar negeri demi menuntaskan aktivitas terorisme beserta afiliasinya (Guler & Demir, 2024). Tindakan kontra-terorisme memuat tiga strategi utama, yakni defensif, proaktif, dan konsolidatif. Strategi Defensif ditujukan untuk mengurangi kemungkinan keberhasilan logistik atau pembiayaan terorisme. Lalu strategi proaktif, strategi ini termasuk *hard power* atau tindakan ofensif untuk melemahkan kelompok teroris. Kemudian strategi konsolidatif, yakni pemberian insentif damai yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik keterlibatan politik yang sah demi menekan aksi terorisme melalui protes tanpa kekerasan (Todd Sandler, 2023).

Sejak awal 2000-an, kebijakan kontra-terorisme Filipina dalam menanggulangi ASG didominasi oleh pendekatan militeristik yang menempatkan terorisme sebagai ancaman keamanan nasional utama. Hal ini tercermin dalam intensifikasi operasi militer di Mindanao pasca peristiwa 9/11 melalui kerja sama keamanan dengan Amerika Serikat dalam kerangka Operation Enduring Freedom Philippines (2002–2015). Selama periode tersebut, ribuan personel militer Filipina dikerahkan dalam operasi kontra-terorisme terpadu, dengan dukungan pelatihan, intelijen, dan logistik dari pihak eksternal. Selain itu, pengesahan undang-undang Human Security Act (HSA) 2007 memperluas kewenangan aparat dalam penahanan dan pengawasan terhadap tersangka terorisme, yang kemudian diperkuat kembali melalui Anti-Terrorism Act 2020 (Republic of Philippines - Anti-Terrorism Council, 2020).

Dominasi pendekatan militeristik ini mencapai puncaknya dalam pengepungan Marawi tahun 2017, yang melibatkan lebih dari 10.000 personel keamanan. Strategi *hard approach* kontra-terorisme Filipina memang dapat melemahkan aktivitas kelompok-kelompok bersenjata namun, strategi ini tidak sedikit menuai kontroversi dan mengakibatkan dampak kerusakan yang tinggi. Situasi kompleks di Mindanao seakan-akan menjadi peluang positif bagi kelompok teroris jaringan global untuk merebut dan menyebarluaskan ideologi ekstrimnya melalui cara yang kejam seperti pengeboman, penyelundupan senjata, hingga penculikan untuk tebusan (Chaidar dkk., 2019). Laporan menunjukkan hingga 1 Desember 2024, lebih dari 115.000 orang di wilayah Filipina Selatan mengungsi akibat konflik bersenjata, perhelatan klan, jaringan kejahatan, dan bencana alam (Acaps, 2025). Data tersebut menunjukkan bahwa Filipina Selatan sampai saat ini masih menjadi kawasan rentan akan jaringan kejahatan terorganisir.

Meskipun operasi tersebut berhasil merebut kembali kontrol wilayah negara dan melemahkan kepemimpinan kelompok bersenjata, berbagai laporan menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kekuatan militer belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan radikalisasi dan ketidakstabilan sosial di wilayah Filipina Selatan. Hal ini kemudian menjadi titik awal bagi evaluasi dan pergeseran kebijakan di fase berikutnya. Lebih lanjut, melalui pidato resmi Sekretaris Jenderal PBB tahun 2016 terkait *Plan Action to Prevent Violent Extremism*, Filipina sebagai negara anggota kemudian, mengadopsi rencana aksi nasional dalam bentuk kebijakan NAP-P/CVE atau *National Action Plan on Preventing and Countering Violent Extremism* melalui Anti-Terrorism Council Resolution No. 38 tahun 2019

yang menggambarkan penguatan *soft approach* dalam kebijakan kontra-terorisme Filipina.

Berdasarkan studi literatur yang telah ada, penelitian mengenai strategi kontra-terorisme Filipina memang telah banyak dibahas, baik dari perspektif keamanan, hukum, *hard approach*, atau bahkan *soft approach*. Namun, terdapat satu hal yang masih belum banyak dibahas dalam konteks strategi *soft approach* kontra-terorisme Filipina, yakni perubahan pemaknaan identitas terhadap ASG di Mindanao melalui skema NAP-P/CVE yakni pada proses reintegrasi mantan militan yang turut berkontribusi dalam pergeseran konstruksi kebijakan kontra-terorisme Filipina. Melalui metode kualitatif eksplanatif, penelitian ini juga akan menawarkan perspektif baru melalui pendekatan konstruktivisme berbasis identitas dan diperkuat dengan konsep *Disarmament, Demobilization, and Reintegration* (DDR).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dinamika permasalahan tersebut penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan, yakni :

“Bagaimana perubahan konstruksi identitas oleh pemerintah Filipina terhadap Abu Sayyaf Grup (ASG) dalam kebijakan kontra-terorisme di Mindanao?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memberikan penjelasan

mengenai pergeseran kebijakan kontra-terorisme Filipina melalui pemaknaan identitas terhadap kelompok terorisme yang tergambar dari implementasi *soft approach* dalam proses reintegrasi kelompok Abu Sayyaf Grup (ASG) di Mindanao.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Memberikan penjelasan mengenai strategi pemerintah Filipina dalam menangani isu terorisme di Filipina Selatan terkhusus Mindanao.
2. Memberikan pemahaman mengenai pengadopsian kerangka kebijakan NAP-P/CVE Filipina sebagai bentuk komitmen negara dalam mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme.
3. Memberikan eksplanasi mengenai pergeseran konstruksi kebijakan kontra-terorisme Filipina yang bermula dari prioritas *hard approach* menuju ke penguatan *soft approach* ternyata didalamnya terdapat perubahan pemaknaan terhadap kelompok insurgensi di Mindanao.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan pemikiran ilmiah untuk para pembaca mengenai strategi kontra-terorisme, terkhusus dalam skema NAP-P/CVE Filipina. Di sisi lain, penelitian ini juga diharapkan dapat melengkapi kekosongan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai kontra-terorisme di Mindanao, Filipina Selatan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini memiliki kegunaan praktis dalam penambahan wawasan pengetahuan serta urgensi mengenai kebijakan kontra-terorisme yang menjadi langkah pemerintah dalam memerangi ancaman terorisme. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pandangan baru melalui teori dan konsep yang digunakan penulis dalam penelitian sebagai bentuk implementasi akademis yang selama ini dipelajari di bangku perkuliahan. Selain itu, penulis ingin menunjukkan bahwa kebijakan kontra-terorisme yang biasanya didominasi oleh kekuatan militer, ternyata tidak sepenuhnya dapat menyelesaikan persoalan terorisme, sehingga diperlukan dukungan yang komprehensif dari strategi *soft approach* yang mencakup berbagai inisiasi pembangunan sosial, kolaborasi multisektor dan reintegrasi.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Kontra-terorisme merupakan serangkaian strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh suatu negara untuk menghadapi ancaman terorisme. Penelitian mengenai hal ini pada dasarnya telah banyak dilakukan. Guna mengkaji lebih dalam dan melihat perbedaannya, penelitian ini akan disandingkan terlebih dahulu dengan beberapa peneliti sebelumnya. Pada penelitian Nicky C. Yungco & Daisy Lou (2024) dalam "*Development of a Monitoring and Visualization Tool for Acts of terrorism in Mindanao, Philippines*" mengemukakan bahwa Filipina telah melakukan berbagai langkah untuk memerangi ancaman terorisme. Salah satu

upaya nya adalah dengan pengembangan teknologi visualisasi untuk monitoring aktivitas terorisme terkhusus di wilayah Mindanao, Filipina Selatan. Alat pemantau ini sangat penting untuk pendukung keberjalanan kontra-terorisme yang dilakukan oleh pemerintah Filipina agar dapat memungkinkan adanya analisis pengambilan keputusan yang lebih efektif. Namun, penelitian ini tidak secara mendalam membahas mengenai dampak dari adanya inovasi alat deteksi aktivitas terorisme di Mindanao terhadap kondisi masyarakat (Yungco & Polestico, 2024).

Selanjutnya, Todd Sandler (2023) juga mengungkapkan argumennya pada penelitian yang berjudul *“An Economic Perspective on Terrorism and Counterterrorism”* bahwa kebijakan kontra-terorisme seharusnya tidak hanya didominasi oleh pertimbangan keamanan saja, namun juga dari pertimbangan ekonomi seperti biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk hal ini serta dampak stabilitas sosial setelahnya. Sandler berpendapat bahwa jika strategi kebijakan kontra-terorisme yang terlalu bergantung pada militeristik sering kali memiliki konsekuensi ekonomi yang cukup besar dan kurang meminimalisasi ancaman terorisme dalam jangka panjang. Namun dalam penelitiannya, Sandler hanya berfokus pada analisis ekonomi dan manfaat tanpa secara mendalam memberikan penjelasan mengenai implementasi kebijakan di tingkat lokal. Dalam konteks Filipina Selatan, strategi *soft approach* menjadi faktor penting dalam peningkatan efektivitas kebijakan kontra-terorisme (Todd Sandler, 2023).

Sejalan dengan hal ini, penelitian dari Mendoza et al. (2021) yang berjudul *“Counterterrorism in the Philippines : Review of Key Issues”* mengatakan bahwa kontra-terorisme yang dilakukan oleh pemerintah Filipina mengalami banyak

tantangan terutama pada dominasi *hard approach*. Pendekatan ini memang efektif untuk jangka pendek, tetapi tidak sedikit pula efek negatif yang ditimbulkan pasca operasi militer bagi masyarakat lokal. Selain itu, peneliti juga menyoroti mengenai *Anti-Terrorism Act of 2020* yang kontroversial dan dianggap kurang tepat karena diberlakukan ditengah pandemi Covid-19 yang justru membuat masyarakat skeptis. Kurangnya koordinasi antara aktor keamanan Filipina, baik dari militer, polisi, maupun lembaga pemerintah dalam penanganan ancaman terorisme. Dalam hal ini, Mendoza et al berargumen bahwa kontra-terorisme yang dilakukan Filipina bersifat reaktif dalam penerapan hukumnya. Tingkat keberhasilan kebijakan kontra-terorisme tidak hanya dilihat dari operasi militernya saja, namun harus diimbangi dengan koordinasi strategi kepada masyarakat melalui berbagai program *soft approach* dan penegakan hukum yang efektif serta efisien. Namun, dalam penulisan ini hanya membahas mengenai evaluasi kebijakan keamanan serta represi militer, penulis tidak menyoroti evaluasi strategi *soft approach* bidang restorasi sosial, terkhusus reintegrasi mantan militan di Filipina Selatan (Mendoza dkk., 2021).

Filipina telah melakukan banyak upaya *soft approach* selama beberapa dekade terakhir, seperti program reintegrasi mantan militan, rehabilitasi, pembangunan nasional berbasis komunitas, hingga edukasi publik. Dalam konteks kontra-terorisme Filipina, penting adanya untuk mengeksplorasi strategi *soft approach* yang lebih berfokus pada pemulihan kondisi sosial masyarakat. Penelitian yang ditulis oleh Umam et al., (2023) dalam "*The Dynamics of The Philippines Terrorism and Counter-Terrorism Policies in the Context of ASEAN Cooperation*" mengatakan bahwa dinamika terorisme di Filipina sangatlah masif.

Pemerintah pada dasarnya sudah melakukan strategi kontra-terorisme yang melibatkan komunitas sosial baik domestik maupun asing, yang mana hal ini merupakan bagian dari *soft approach*. Salah satu contohnya adalah *Global Community Engagement and Resilience Fund (GCERF)* yang merupakan inisiatif global untuk mendukung strategi *soft approach* dalam kebijakan kontra-terorisme di banyak negara, termasuk Filipina. Pada penelitian ini, Umam et al., menyoroti implementasi GCERF yang melahirkan kerja sama dengan organisasi lokal dan menciptakan program *Synergeia Foundation* yang ditujukan untuk peningkatan tata kelola pemerintah dalam mengatasi ketidakpuasan masyarakat yang sering kali menjadi pemicu utama radikalisasi. Namun, Umam et al tidak secara mendalam membahas mengenai dampak pendekatan bidang restorasi sosial terutama reintegrasi mantan militan Filipina Selatan sebagai bagian dari strategi *soft approach* dalam kontribusinya pada perdamaian jangka panjang (Umam dkk., 2023).

Sebaliknya, penelitian milik Melinda & Darmayandi (2024) dalam jurnalnya yang berjudul “*Analysis of the Implementation of the ASEAN Political Security Community Framework in The Philippines in Counter Terrorism Efforts*” mengatakan bahwa Filipina berada pada ikatan pasal-pasal ACCT sejak diratifikasi. Selain itu, APSC 2015 juga menekankan upaya penanggulangan terorisme yang menjadi fokus utama dalam menciptakan kawasan yang aman dan damai. Artinya, serangkaian upaya atau pendekatan militeristik harus dikurangi dan dikontrol. Pada kenyataannya, Filipina masih menggunakan pendekatan militeristik secara tidak terukur dan dalam praktiknya sering kali menargetkan masyarakat tidak bersalah.

Namun, pada penulisan Melinda & Darmayadi ini hanya berfokus pada ketidaksesuaian Filipina dengan kerangka APSC dan tidak secara mendalam membahas mengenai dampak militeristik yang mempengaruhi kesiapan masyarakat dalam implementasi *soft approach* (Melinda & Darmayadi, 2024).

Berdasarkan tinjauan literatur sebelumnya, penelitian mengenai implementasi *soft approach* dalam kebijakan kontra-terorisme Filipina cenderung berfokus pada kritik terhadap pendekatan militeristik serta evaluasi perbandingan antara *hard approach* dan *soft approach*. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana pergeseran konstruksi kebijakan kontra-terorisme Filipina khususnya melalui kerangka NAP-P/CVE membentuk ulang identitas aktor, relasi negara dan masyarakat, serta mempengaruhi proses reintegrasi mantan militan masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis konstruksi kebijakan tersebut melalui perspektif konstruktivisme berbasis identitas, sehingga tidak hanya menilai efektivitas kebijakan, tetapi juga menjelaskan bagaimana perubahan pemaknaan terhadap ancaman dan aktor keamanan berkontribusi dalam membentuk ulang pendekatan kontra-terorisme yang lebih menjangkau dimensi sosial.

1.5.2 Teori Konstruktivisme Berbasis Identitas

Pendekatan militeristik dalam kebijakan kontra-terorisme sering kali didominasi pada tindakan koersif dan keamanan nasional, tanpa ada pertimbangan lebih mendalam mengenai faktor sosial yang memengaruhi paham-paham militan garis keras. Dalam konteks Mindanao, dimana banyak kelompok-kelompok militan yang telah lama beroperasi dengan latar belakang konflik struktural dan

pemerintah telah menunjukkan respon yang cukup signifikan dalam hal ini. Maka dari itu, penelitian ini akan menekankan pada penjelasan mengenai perubahan konstruksi identitas terhadap kelompok insurgensi yang berkontribusi dalam pergeseran kebijakan kontra-terorisme Filipina melalui perspektif konstruktivisme berbasis identitas.

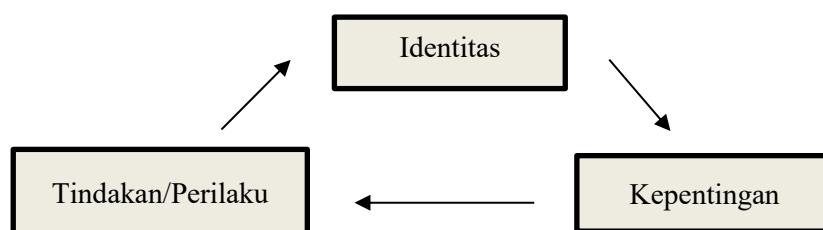
Lensa ini akan memberikan cara pandang dan ciri khas yang berbeda, yang biasanya digunakan untuk melihat relasi antar negara dan aktor lainnya, sebagaimana Alexander Wendt mengatakan dalam tulisannya yang berjudul “*Anarchy is What States Make of It*” (1992) bahwa anarki dalam sistem internasional bukanlah sesuatu yang alamiah terjadi atau *inheren chaos*, melainkan juga hasil dari sebuah konstruksi sosial (Wendt, 1992). Namun dalam penelitian ini, konstruktivisme akan digunakan untuk melihat relasi antara negara dan aktor insurgensi. Dalam konteks strategi kontra-terorisme di Filipina, strategi *hard approach* yang didominasi oleh operasi militer justru dapat memberikan persepsi negatif antara pemerintah, kelompok-kelompok militan, maupun masyarakat yang berada di wilayah konflik. Sebaliknya, *soft approach* mempunyai potensi untuk merekonstruksi pemaknaan ini dengan pola interaksi dan mekanisme baru yang lebih kondusif, salah satunya melalui proses reintegrasi.

Wendt memperkuat gagasannya dengan tiga logika anarki yang dikembangkan pada buku yang berjudul “*Social Theory of International Politics*” (1999:246-308), pertama adalah Hobbesian atau yang dapat dilabeli dengan permusuhan. Karakteristik dari Hobbesian ini mencakup tindakan ofensif, supremasi militer, dan menginisiasi serangan. Kedua adalah Lockean atau dengan

identitas rivalitas. Karakteristiknya lebih condong ke defensif, menganggap militer tetap penting namun bukanlah kekuatan satu-satunya, serta intervensi militer terbatas. Terakhir adalah logika Kantian atau sebagai teman dengan menekankan non-kekerasan, melakukan kerja sama namun untuk mencapai kepentingan sendiri, dan kerja sama demi kepentingan kolektif (Wendt, 1999). Melalui logika anarki Hobbesian, strategi *hard approach* dalam kontra-terorisme di Filipina dianggap bahwa negara memerangi ancaman terorisme itu sebagai musuh yang harus dihancurkan.

Sebaliknya, strategi *soft approach* memiliki kemungkinan untuk penciptaan perubahan mekanisme serta hubungan sosial, yang artinya dapat memberikan potensi transisi ke logika anarki Lockean, dimana negara yang berhasil dikonstruksikan sebagai aktor yang cenderung menggunakan operasi militer dapat bergeser menjadi negara yang mulai memperkuat *soft approach* dalam responsnya. Konstruktivisme dalam studi hubungan internasional pada dasarnya memiliki beberapa konsep untuk membantu menjelaskan perilaku atau tindakan suatu negara. Salah satunya adalah identitas sosial, yang merupakan suatu hasil dari interaksi antar aktor. Wendt juga berargumen bahwa suatu konstruksi identitas itu memiliki peran penting dalam membentuk perilaku aktor.

Gambar 1. 1 Relasi antara Identitas, Kepentingan, dan Tindakan



Source: (Rosyidin, 2022)

Mohamad Rosyidin menegaskan kembali dalam bukunya yang berjudul “*Teori Hubungan Internasional dari Perspektif Klasik sampai Non-Barat*” (2022:93-96) bahwa identitas memiliki peran penting dalam mendefinisikan suatu kepentingan untuk menentukan perilaku atau tindakan yang akan diambil (Rosyidin, 2022). Relasi antara negara sebagai aktor keamanan dan kelompok insurgensi, dalam hal ini adalah kelompok Abu Sayyaf di Mindanao akan dianalisis melalui konstruktivisme berbasis identitas yang tentunya akan menekankan pada *framework* relasi antara identitas, kepentingan, serta tindakan seperti yang disampaikan oleh Wendt (1992 & 1999) dan Rosyidin (2022). Jika selama ini teori konstruktivisme hanya digunakan untuk melihat relasi negara dengan negara, maka dalam penelitian ini, konstruktivisme akan digunakan ke dalam pembahasan perang *intra state war* yakni antara negara dengan aktor non negara.

1.5.3 Konsep *Disarmament, Demobilization, and Reintegration* (DDR)

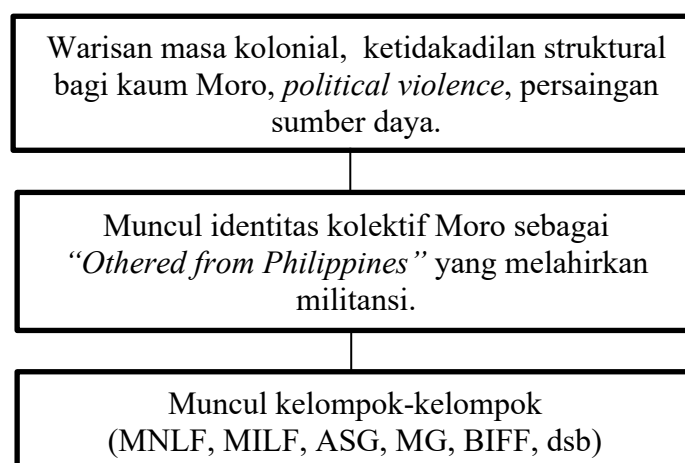
Disarmament, Demobilization, and Reintegration merupakan konsep yang dikembangkan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) untuk mencapai perdamaian global. *DDR Framework* ini menawarkan pendekatan yang komprehensif dalam menangani mantan kombatan atau militan pasca konflik. Konsep ini tidak hanya berfokus pada pelucutan senjata maupun aspek keamanan saja, namun juga menekankan pentingnya reintegrasi sosial dan ekonomi sebagai tindakan preventif kembalinya mantan kombatan atau militan ke aktivitas radikal. Dalam konteks kontra-terorisme di Mindanao, konsep DDR dapat menjadi kerangka analisis yang relevan. Melalui tiga tahapan utama DDR, yakni *disarmament* atau pelucutan senjata ringan hingga berat milik mantan kombatan

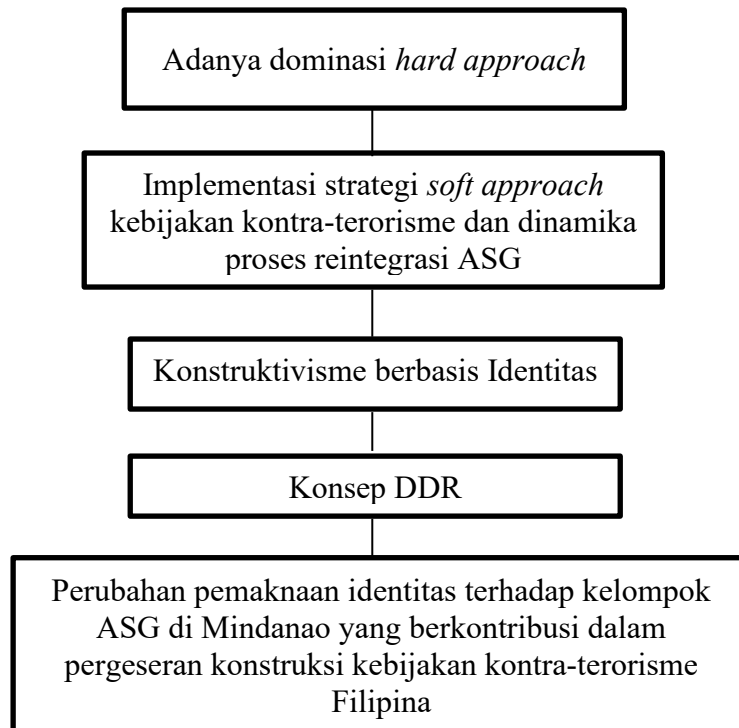
yang mencakup pengelolaan senjata yang bertanggung jawab. Tahapan kedua adalah demobilisasi atau pembubaran unit bersenjata dan pelepasan kelompok-kelompok bersenjata. Terakhir adalah reintegrasi atau pengembalian mantan kombatan atau militan ke masyarakat melalui pelatihan, pemberdayaan sosialekonomi, hingga pembangunan kembali hubungan sosial politik mantan militan dengan masyarakat (UNDP, 2005).

Selain itu, konsep ini juga sejalan dengan konstruktivisme yang menekankan bahwa identitas suatu negara tidak alamiah, melainkan dapat terbentuk ulang melalui hasil dari proses interaksi. Dengan adanya strategi *soft approach* dalam kebijakan kontra-terorisme, negara dapat membentuk pola interaksi baru terhadap dinamika proses reintegrasi kelompok militan (ASG) di Mindanao. Oleh karena itu, konsep *DDR Framework* yang dikembangkan oleh UNDP diharapkan dapat menjadi pelengkap dalam menganalisis upaya pemerintah dalam membentuk pola interaksi baru dalam proses reintegrasi kelompok militan.

1.5.4 Visualisasi Kerangka Pemikiran

Gambar 1. 2 Visualisasi Kerangka Pemikiran





Source: (diolah oleh penulis)

Berdasarkan bagan diatas, penelitian akan dikaji mulai dari akar permasalahan yang dialami Filipina Selatan selama ini yang melahirkan militan-militan garis keras. Kemudian, masuk pada upaya yang dilakukan pemerintah melalui strategi kontra-terorisme namun sejak dekade-dekade awal, pemerintah condong dengan penggunaan militer yang justru mengesampingkan sentuhan sosial untuk upaya penyelesaian akar permasalahan. Seiring berjalannya waktu, pemerintah kemudian mulai mengimplementasikan strategi *soft approach* dalam kebijakan kontra-terorisme di Mindanao. Selanjutnya, untuk menciptakan argumen yang terhubung, penelitian ini akan menggunakan konstruktivisme berbasis identitas, yang menekankan bahwa pemaknaan identitas baru terhadap kelompok ASG ternyata mendorong pergeseran konstruksi kebijakan kontra-terorisme Filipina di Mindanao.

Pendekatan ini berfokus pada bagaimana relasi antara identitas yang merupakan hasil dari konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi sosial dan pemaknaan tertentu dapat mempengaruhi kepentingan dan tindakan/perilaku suatu negara. Sejalan dengan ini, untuk memahami lebih dalam mengenai konteks penelitian, peneliti juga menggunakan konsep *Disarmament, Demobilization, and Reintegration* (DDR) sebagai bagian dari kerangka analisis untuk membantu mengkaji bagaimana proses reintegrasi kelompok ASG di Mindanao berkontribusi dalam pergeseran konstruksi kebijakan kontra-terorisme Filipina.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konsep

1.6.1.1 Pergeseran

Istilah pergeseran disini mengacu pada perubahan yang terjadi secara bertahap, baik secara orientasi, pola, atau pendekatan suatu aktor tertentu sebagai suatu respons dinamika sosial dan politik yang dihadapi. Pergeseran juga dapat diartikan sebagai penyesuaian strategis dari suatu kebijakan yang berkembang seiring perubahan konteks keamanan geopolitik maupun situasi sosial tanpa menghilangkan pendekatan yang sebelumnya. Dalam konteks hubungan internasional, pendorong dari adanya pergeseran ini umumnya karena perkembangan kepentingan, tekanan eksternal, pemaknaan, serta dinamika geopolitik yang dinamis. Maka, muncul penataan ulang atau penyesuaian sistem baru yang signifikan dalam kerangka kebijakan (Trinidad, 2006)

1.6.1.2 Identitas

Salah satu penggagas identitas dari kalangan konstruktivis, yakni Alexander Wendt mendefinisikan identitas sebagai pemahaman kolektif mengenai “siapa kita?” yang terbentuk dari hasil interaksi sosial. Selain itu, dalam kacamata konstruktivis, identitas juga tidak bersifat alamiah, melainkan terus berkembang seiring dengan perubahan norma, nilai, dan proses interaksi sosial. Kemudian Wendt mengklasifikasikan empat tipe identitas, pertama adalah identitas korporat yang mengacu pada ciri-ciri intrinsik suatu negara dan tidak dapat berubah. Kedua identitas tipe atau berkaitan dengan hal-hal yang melekat pada diri aktor berdasarkan ciri-ciri non-fisik. Ketiga adalah identitas peran atau mengacu pada tanggung jawab yang sedang diemban oleh suatu aktor di kancah politik internasional. Terakhir adalah identitas kolektif atau dapat diartikan melalui kesamaan identitas yang dimiliki oleh dua atau lebih negara. Seperti kesamaan dalam hal karakteristik sosial, budaya, atau sejarah yang dimilikinya sehingga timbul rasa solidaritas (Wendt, 1999). Ketika ditarik dalam konteks hubungan internasional, maka identitas aktor ditentukan melalui hasil interaksi dengan aktor lain. Hal ini sejalan dengan bagaimana suatu aktor memandang dirinya sendiri dan bagaimana ia ingin dilihat oleh aktor lain.

1.6.1.3 Kontra-terorisme

Kontra-terorisme atau anti terorisme secara umum dapat didefinisikan sebagai upaya, strategi, maupun taktik untuk memerangi ancaman terorisme. Menurut Todd Sandler dalam tulisannya yang berjudul “*Terrorism and counterterrorism: an overview*” (2014) menyebutkan secara sederhana bahwa

kontra-terorisme adalah segala tindakan untuk mengurangi ancaman dan konsekuensi dari aktivitas terorisme. Serangkaian tindakan ini biasanya dilakukan oleh pemerintah, angkatan bersenjata, organisasi internasional, ataupun entitas lainnya untuk mencegah, merespons, dan mengurangi ancaman serta dampak dari aktivitas terorisme (Sandler, 2014). Dalam konteks ini, kontra-terorisme diklasifikasikan menjadi dua yakni, upaya defensif dan proaktif. Upaya defensif mencakup perlindungan target potensial dengan meningkatkan keamanan, perketat pengawasan, serta memastikan untuk mengurangi peluang keberhasilan serangan teroris. Kedua adalah upaya proaktif yang melibatkan tindakan langsung terhadap kelompok teroris hingga afiliasinya. Upaya ini ditujukan untuk melemahkan kapasitas operasional kelompok teroris dan mencegah aksi mereka. Sejalan dengan hal ini, Sandler kemudian memperjelas lagi pada tulisannya di “*An Economic Perspective on Terrorism and Counterterrorism*” (2023) dengan upaya konsolidatif, yakni pemberian insentif damai yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik keterlibatan politik yang sah demi menekan aksi terorisme melalui protes tanpa kekerasan (Todd Sandler, 2023).

1.6.1.4 Reintegrasi

Reintegrasi secara umum merupakan proses multidimensi yang memungkinkan individu yang sebelumnya terlibat konflik untuk kembali ke masyarakat kemudian dapat membangun kembali hubungan ekonomi, sosial, hingga psikososial dalam kehidupan bermasyarakat yang inklusif (IOM, 2019). Selain itu menurut UNDP dalam *framework* DDR, reintegrasi merupakan fase terakhir dalam proses pemulihan mantan militan atau individu yang terlibat dalam

kelompok bersenjata agar mereka dapat kembali ke kehidupan normal secara bermakna dan berkelanjutan (UNDP, 2005). Proses reintegrasi memuat beberapa aspek utama, yang pertama adalah reintegrasi sosial. Aspek ini menekankan pada penerimaan individu oleh masyarakat serta meminimalisir stigmatisasi dan diskriminasi. Kedua adalah reintegrasi ekonomi yang mencakup pemberdayaan keterampilan, akses pekerjaan yang layak, hingga bantuan finansial agar individu memiliki sumber penghidupan lagi. Ketiga adalah reintegrasi politik dan hukum, hal ini berfokus pada rehabilitasi hukum, pemberian amnesti, hingga penghapusan hambatan administratif yang menghalangi individu untuk kembali ke kehidupan normal (Annan dkk., 2011).

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Pergeseran

Pergeseran dalam konteks penelitian ini mengarah pada perubahan secara bertahap dalam strategi kontra-terorisme, yang bermula menggunakan langkah-langkah tradisional yang sifatnya konfrontatif menuju ke pendekatan yang lebih menyeluruh dan inklusif. Istilah pergeseran ini memberikan definisi yang tidak secara serta-merta menggantikan *hard approach* pada strategi kontra-terorisme Filipina, melainkan lebih menerapkan *human security approach* dengan penggunaan *hard approach* dan *soft approach* secara seimbang serta saling melengkapi. Hal ini dapat dikatakan bahwa bergeser disini bermula pada level diskursus sebagai legitimasi strategi yang harus diaplikasikan mulai dari pemerintahan pusat hingga lokal, kemudian berkembang pada level *behavioral* yang diwujudkan dengan implementasi program-program *soft approach*.

1.6.2.2 Identitas

Identitas dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai hasil dari pola dan interaksi pemerintah Filipina dalam memaknai kelompok insurgensi dalam implementasi strategi *soft approach* khususnya pada dinamika proses reintegrasi kelompok Abu Sayyaf Grup (ASG) di Mindanao. Dengan kata lain, identitas dalam konteks ini dipahami sebagai hal yang dinamis dan terus berkembang, tergantung pada interaksi suatu negara dalam menciptakan sistem dan strukturnya. Identitas dalam konteks ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti budaya warisan masa kolonialisme, akar permasalahan sosial yang terjadi secara struktural, munculnya identitas kolektif yang kuat, bagaimana negara bertindak, hingga implementasi kebijakan yang dibentuk.

1.6.2.3 Kontra-Terrorisme

Kontra-terorisme dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai kebijakan ataupun strategi yang dilakukan oleh pemerintah Filipina untuk menangani ancaman terorisme. Sejatinya, kontra-terorisme memiliki dua pendekatan utama yakni, *hard approach* dan *soft approach*. Dalam penelitian ini, kontra-terorisme berfokus pada strategi *soft approach* mencakup upaya non-militer seperti rehabilitasi, reintegrasi, *livelihood/economic empowerment*, serta kerja sama negara dengan pihak lain. Strategi *soft approach* menjadi aspek sangat krusial dalam penelitian ini karena bertujuan untuk mengatasi akar problematika terorisme.

1.6.2.4 Reintegrasi

Reintegrasi dioperasionalkan sebagai proses mengembalikan individu yang sebelumnya terlibat dalam aksi terorisme ke dalam masyarakat melalui berbagai

program pemberdayaan sosial dan ekonomi secara bertahap dan berkelanjutan. Selain itu, reintegrasi juga mencakup upaya pembangunan kembali hubungan sosial dan politik antara mantan militan dengan masyarakat, sehingga dapat mengurangi potensi mereka kembali ke aktivitas radikal (UNDP, 2005). Proses reintegrasi pada penelitian ini menitikberatkan pada dinamika reintegrasi terhadap kelompok ASG. Selain itu, reintegrasi juga menjadi bagian yang krusial dalam strategi *soft approach* kontra-terorisme untuk membangun kembali kondisi sosial dan ekonomi komunitas. Adanya trauma konflik berkepanjangan yang dialami masyarakat akibat dampak dari dominasi militeristik, program reintegrasi kemudian dirancang dengan pendekatan multidimensi termasuk pada aspek psikologis, pendidikan, hingga pelatihan ketrampilan. Keberhasilan reintegrasi sangat bergantung pada dukungan pemerintah dan masyarakat.

1.7 Argumen Penelitian

Pergeseran konstruksi kebijakan kontra-terorisme Filipina dari prioritas *hard approach* menuju penguatan *soft approach* tidak hanya semata-mata didorong oleh pertimbangan efektivitas keamanan saja, melainkan didalamnya juga terdapat perubahan pemaknaan terhadap identitas kelompok insurgensi atau dalam hal ini adalah Abu Sayyaf Grup (ASG). Pada fase awal, ASG dimaknai sebagai ancaman yang harus dieliminasi. Konstruksi identitas yang dibangun oleh Filipina terhadap ASG mengalami pergeseran pemaknaan, yang bermula dari “musuh negara” menjadi aktor yang dapat dipulihkan atau kembali menjadi “warga negara”. Pemaknaan identitas baru ini dilegitimasi melalui pengadopsian NAP-P/CVE yang didalamnya tergambar dari program reintegrasi mantan militan sebagai

implementasi *soft approach* di Mindanao. *Soft approach* disini bukan semata-mata karena persoalan anggaran negara ataupun penggunaan upaya lain, namun juga ada pengaruh dari pemaknaan identitas baru oleh pemerintah Filipina terhadap kelompok ASG sehingga dapat menggeser kebijakan pemerintah dalam hal kontra-terorisme.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif sebagai landasan utamanya. Berdasarkan penjelasan dari buku yang berjudul “*Qualitative Methods in International Relations: A Pluralist Guide*” by Palgrave Macmillan menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif sangatlah berguna untuk memahami fenomena sosial yang kompleks, termasuk pada konteks hubungan internasional. Metode ini akan menekankan pada konteks, makna, serta dengan tujuan untuk menjabarkan realitas sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Macmillan, 2008). Selain itu, penelitian ini akan menggunakan dua sumber data, yakni sumber primer yang diambil melalui wawancara, kerangka kebijakan pemerintah Filipina, dan pernyataan pemerintah. Sementara itu, data sekunder akan diambil dari artikel ilmiah, jurnal akademik, buku, laporan dari organisasi internasional, serta media-media yang relevan.

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe eksplanatif. Hal ini selaras dengan pernyataan yang mengatakan bahwa tipe ini memiliki karakteristik dengan pengerjaan akan pemahaman serta penjabaran mengenai suatu akibat persoalan.

Adapun alasan penelitian ini menggunakan tipe eksplanatif karena berusaha menganalisis bagaimana pergeseran konstruksi kebijakan kontra-terorisme Filipina didorong oleh pemaknaan identitas terhadap ASG di Mindanao. Dalam hal ini, variabel yang berpengaruh adalah kebijakan kontra-terorisme Filipina, yakni strategi *soft approach* dalam kerangka NAP-P/CVE yang menekankan dimensi sosial dan kerja sama lintas sektor dalam implementasinya. Sedangkan variabel yang terpengaruh ialah proses reintegrasi kelompok ASG sebagai bagian dari implementasi NAP-P/CVE di Mindanao.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di beberapa tempat atau wilayah, yakni Semarang, Jakarta, serta melalui *platform* daring. Pemilihan tempat atau wilayah ini didasarkan pada beberapa alasan dan pertimbangan utama, seperti relevansi wilayah terhadap konteks penelitian yang akan dikaji, tempat pengumpulan data dan informasi, dan juga aksesibilitas terhadap koresponden yang nantinya akan menjadi sumber data primer penelitian ini. Penelitian metode kualitatif ini akan dilakukan dalam situasi alamiah tanpa adanya manipulasi terhadap latar penelitian. Dengan demikian, data yang dihimpun nantinya akan mencerminkan kondisi yang nyata sehingga dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih komprehensif terhadap konteks yang diteliti.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam hal ini dapat diartikan sebagai sumber informasi yang nantinya akan diperoleh untuk diolah serta menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini akan menggunakan dua subjek penelitian. Pertama, subjek penelitian

dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang merujuk pada responden, yakni individu atau sebuah instansi yang berperan untuk memberikan jawaban serta tanggapan peneliti, baik secara lisan maupun tertulis. Adapun subjek penelitian yang akan dijadikan sebagai sumber data primer adalah dari peneliti yang kajiannya relevan dengan topik, perwakilan NGO/CSO lokal, akademisi, jurnalis Filipina, laporan dari media-media Filipina, atau pernyataan resmi dari pemerintah. Kemudian subjek lain yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah dari berbagai literatur dan laporan resmi yang relevan dengan penelitian. Seperti halnya, dokumen dan laporan resmi yang diterbitkan oleh organisasi internasional seperti Laporan Dewan Keamanan PBB, UNDP, Global Terrorism Index, dan lain sebagainya. Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber pelengkap seperti jurnal akademik, artikel ilmiah, dan beberapa buku dari berbagai publikasi ilmiah yang berkaitan dengan konteks penelitian. Dengan demikian, subjek penelitian tersebut harapannya dapat menjadi penguat argumentasi dan temuan penelitian.

1.8.4 Jenis Data

Penelitian ini akan menggunakan dua jenis data. Pertama adalah data primer yang didapatkan dari jembatan informasi utama secara langsung, data ini dapat berupa kesaksian ataupun pernyataan lisan maupun tulisan dari subjek penelitian. Kedua adalah data sekunder. Data sekunder ini dapat didefinisikan sebagai segala informasi yang dihimpun dari tangan kedua atau secara tidak langsung melalui sumber-sumber tertulis, berupa studi kepustakaan seperti buku, artikel ilmiah, jurnal akademik, laporan resmi, hingga dokumen-dokumen terpercaya mengenai

konteks penelitian (Lune & Berg, 2017). Melalui data sekunder ini, peneliti diharapkan dapat menganalisis berbagai perspektif yang telah dikaji sebelumnya serta memperoleh informasi dari sumber-sumber terpercaya. Dengan demikian, penggunaan dua jenis data ini bertujuan untuk memberikan landasan yang kokoh dalam memahami konteks penelitian.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data yang menjadi basis dari penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber primer akan diperoleh melalui hasil wawancara yang dilakukan secara langsung baik daring atau luring dan juga secara tertulis melalui *e-mail* atau *platform* sejenisnya baik bersama peneliti yang berfokus dengan kajian yang relevan, akademisi, NGO/CSO lokal, laporan dari media-media terpercaya, maupun pernyataan resmi dari pemerintah. Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang berasal dari sumber-sumber tertulis dan secara tidak langsung. Hal ini meliputi buku, artikel ilmiah, jurnal akademik, hingga laporan dan dokumen resmi yang berkaitan dengan konteks penelitian seperti Laporan Dewan Keamanan PBB UNDP, Global Terrorism Index, dan lain sebagainya.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan dua teknik pengumpulan data, yakni wawancara dan studi kepustakaan. Pertama adalah teknik pengumpulan data melalui wawancara. Menurut penjabaran Yusuf (2014), wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara dan narasumber melalui komunikasi secara langsung untuk menanyakan sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang

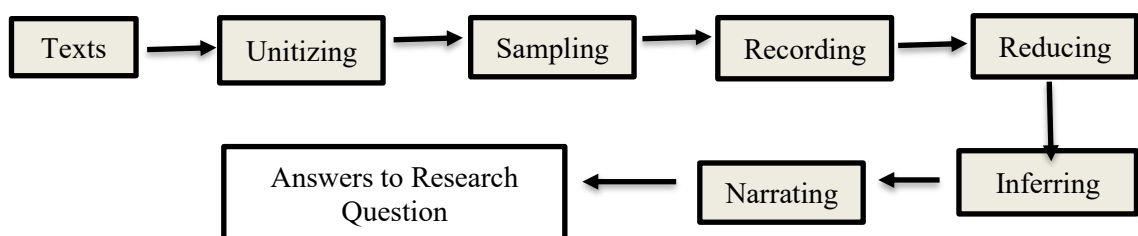
sebelumnya. Penelitian ini akan menggunakan jenis wawancara terencana-tidak terstruktur yang memungkinkan peneliti dapat menyusun jadwal terlebih dahulu agar sesi wawancara dapat berjalan efektif (Yusuf, 2014). Wawancara akan dilakukan secara langsung, baik daring atau luring dan juga secara tertulis melalui *e-mail* ataupun *platform* sejenisnya. Sebelum melakukan wawancara, peneliti akan mengawali dengan studi kepustakaan hingga menyusun materi secara sistematis dengan tujuan agar topik yang nantinya akan dibawa dapat dipahami secara jelas. Kedua adalah teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Teknik ini adalah teknik yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Peneliti akan menghimpun data serta informasi melalui buku, artikel ilmiah, jurnal akademik, serta laporan-laporan resmi yang berkaitan dengan konteks penelitian seperti UNDP, Global Index Terrorism, dan lain sebagainya.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik *content analysis* untuk menginterpretasikan temuan berdasarkan kerangka teori konstruktivisme berbasis identitas dan konsep DDR. *Content Analysis* dapat didefinisikan sebagai teknik analisis kualitatif yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi tema, pola, serta makna dalam teks secara sistematis (Krippendorff, 2004). Identifikasi teks dalam penelitian ini akan terbatas pada dokumen kebijakan, pernyataan resmi dari pemerintah, serta wawancara yang telah dilakukan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana makna sosial terbentuk dalam konteks tertentu melalui proses kategorisasi dan inferensi yang berbasis teori.

Berdasarkan model *Components of Content analysis* oleh Krippendorff (2004), bahwa proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan utama agar mudah untuk memilah, mengonseptualisasikan, membicarakan, serta mengevaluasi desain *content analysis* satu per satu. Tahapan dalam teknik ini mencakup, pertama adalah *texts* atau objek analisisnya. Pada bagian ini bisa berupa dokumen, transkrip wawancara, media, laporan, dan lain sebagainya. Kedua, *unitizing* yakni menentukan unit analisis berupa teks kebijakan dan media. Lalu, *sampling* yang dapat dipahami sebagai langkah memilih sumber data yang relevan secara strategis atau pengambilan sampel data yang akan dianalisis. *Recording/coding* atau merekan data dan informasi sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, seperti mengkodekan temuan berdasarkan kategori analitis berbasis teori. Ada pula, *reducing* atau langkah penyaringan data agar fokus pada aspek yang paling relevan dengan penelitian. Dilanjutkan dengan *inferring* yaitu penafsiran makna dari data berdasarkan teori atau konsep yang digunakan. Terakhir, *narrating* yang merupakan langkah untuk menyusun hasil analisis dalam bentuk interpretasi yang bermakna atau jawaban terhadap pertanyaan penelitian.

Gambar 1. 3 Visualisasi Proses dari *Content Analysis*



Source: (Krippendorff, 2004)

Selaras dengan teknik ini, *content analysis* tidak hanya membantu dalam

menginterpretasikan data agar sistematis. Dengan mengikuti tahapan dari setiap komponen *content analysis*, proses ini diharapkan membantu serta memperkuat analisis teoritis yang bermakna dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teknik *content analysis* tidak hanya memberikan pemahaman mendalam mengenai data yang akan dikaji, tetapi juga sebagai validitas analisis berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang jelas.

1.8.8 Kualitas Data (*goodness criteria*)

Penelitian ini akan memiliki kualitas data yang baik karena bersumber dari dua data utama, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Selain itu, dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan tahapan dengan menggunakan teknik *content analysis* untuk memastikan bahwa data-data yang diperoleh dapat dianalisis secara sistematis serta objektif. Kualitas data primer yang diperoleh dari penelitian ini akan didukung dengan jawaban-jawaban yang berasal dari hasil korespondensi baik bersama peneliti yang kajiannya relevan dengan tulisan, NGO/CSO lokal, pernyataan resmi dari pemerintah, akademisi, jurnalis, maupun laporan dari media-media terpercaya. Sementara itu, guna memperkuat landasan hasil penelitian, akan digunakan pula sumber data sekunder. Sumber data sekunder ini akan dihimpun melalui berbagai penelitian-penelitian sebelumnya, artikel ilmiah, jurnal akademik, buku, serta laporan-laporan resmi dari organisasi internasional.